

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang.
- A.Z Abidin dan Andi Hamzah, 2010, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*, Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 110.
- Asshiddiqie, Jimly, 2007, *Hukum Tata Negara Darurat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Pengantar Ilmu Tata Negara Jilid I*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Bentham, Jeremy, 2006, *Teori Perundang-Undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Penerjemah Nurhadi, Nuansa Bandung.
- Chazawi, Adami, 2009, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Raja Grafindo, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2018, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

CST Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta.

D. Schafmeister, N. Keijzer dan E.PH. Sutorius, 2011, *Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Djafar Saidi, Muhammad, 2011, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

Djaja, Ermansjah, 2013, *Memberantas Korupsi Bersama KPK Edisi Kedua: Kajian Yuridis UURI Nomor 31 Tahun 1999 juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001 Versi UURI Nomor 30 Tahun 2002 juncto UURI Nomor 46 Tahun 2009*, Sinar Grafika.

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2018, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.

E. Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.

Emong Sapardjaja, Komariah, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.

Erwin, Muhammad, 2019, *Filasat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi) Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Farid, A. Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ferry Makawimbang, Hernold, 2015, *Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*, Thafa Media, Yogyakarta.

Finer, Bogdanor dan Rudden, 1995, *Comparing Constitution*, Clarendon Press, Oxford.

H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.

Hamzah, Andi, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

- \_\_\_\_\_, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2014, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Hartanti, Evi, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Herman Sihombing, 1996, *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*, Djamban, Jakarta.
- Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- IGM Nurdjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi; Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2004, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- J.R. Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Kadir Muhammad, Abdul, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2018, *Bersahabat Dengan Bencana Alam*, Badan Pengembangan dan Pendidikan Bahasa, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk membasmi; Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

- La Ode M. Syarif dan Didik E. Purwolekso (Ed), tanpa tahun, *Hukum Anti Korupsi*, USAID, Kemitraan Partnership, The Asia Foundation.
- Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Loewy, Arnold H, 2009, *Criminal Law In A Nutshell*, Fifth Edition, West A Thomson Reuters Business.
- Mahfud MD, Moh, 2006, *Politik Hukum di Indonesia, Pustaka LP3S Indonesia*, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2014, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Dwija Prayitno, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Edisi Revisi*, Prenada Media Group.
- Pendidikan Anti Korupsi, 2011, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Jakarta.
- Pope, Jeromy, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

- Prasetyo, Teguh, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Quinn Patton, Michael, 2006, *Metode Penelitian Evaluasi Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- R. Soesilo, 1974, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor.
- Rommelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Riza Sihbudi dan Moch. Nurhasim, 2003, *Kerusuhan Sosial di Indonesia Studi Kasus Kupang, Mataram dan Sambas*, Grasindo, Jakarta.
- Saleh, K. Wantjik, 1983, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sarwono, 2018, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soehino, 2010, *Politik Hukum di Indonesia*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Soejono dan H. Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Suharso dan Ana Retnonongsih, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Revisi*, Widya Karya, Semarang.

Sumardjono, Maria SW, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Tambunan, Tulus, 2011, *Krisis Ekonomi Indonesia Teori dan Empiris*, Universitas Trisaksi, Jakarta.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Tim Penyusun, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Revisi*, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta.

Togat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Perspektif Pembaharuan*, UMM Pres, Malang.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa (Ed), 2014, *Hukum Pidana Materiil dan Formil*, Usaid, The Asian Fondation , Kemitraan Partnership, Jakarta.

W. Gulo, 2005, *Metodologi Penelitian*, PT. Grasindo, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Frafika, Jakarta.

Widnyana, I Made, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Panduan Mahasiswa*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam, Jakarta.

Wiyanto, Roni, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Yustika, Ahmad Erani, 2011, *Dari Krisis ke Krisis Potret Terkini Perekonomian Nasional*, Universitas Brawijaya, Malang.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Criminal Law of The People's Republic of China.

Prevention of Corruption Act, (Chapter 241) Singapore.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2011.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2958.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003),

Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Lembaran Nergara Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corono Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum dan Militer, Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 1964.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Peraturan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XVI/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1448 K/Pid/Sus/2011.

Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 488/Pid.B/2010/PN.Im.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019.

Draf Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor... Tahun... tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Draf Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Risalah Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **C. Jurnal, Tesis, Disertasi**

Abd. Majid, M. Shabri, 2015, “Krisis Ekonomi Dan Solusinya Dalam Perspektif Islam: Analisis Krisis Ekonomi Global 2008”, *Perspektif Ekonomi Darussalam*, Universitas Syarif Kuala.

Abigail Barr dan Danila Serra, 2006, “Culture and Corruption” *Economic & Social Research Council*, Global Poverty Research Group.

Adityo Susilo, C. Martin Rumende, Ceva W Pitoyo, Widayat Djoko Santoso, Mira Yulianti, Herikurniawan, Robert Sinto, Gurmeet Singh, Leonard Nainggolan, Erni J Nelwan, Lie Khie Chen, Alvina Widhani, Edwin Wijaya, Bramantya Wicaksana, Maradewi Maksum, Firda Annisa, Chyntia OM Jasirwan, Evy Yuniastuti, 2020, “Coronavirus Disease

2019: Tinjauan Literatur Terkini”, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*”, Vol. 7, No. 1, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

Akhmad Faisal Lutfi, Zainuri, Herman Cahyo Diartho, 2020, “Impact Corruption on Economic Growth: A Case Study of 4 Countries in ASEAN”, *E-journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Vol. VII, Universitas Jember.

Alamsyah, Wana, 2020, “Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020”, *Laporan Pemantauan*, Divisi Hukum Monitoring Peradilan, Indonesia Corruption Watch.

Angus Deaton dan Jean Dreze, 2002, “Poverty and Inequality in India A Re-Examination”, *Economic and Political Weekly*, JSTOR.

Arief, Barda Nawawi, 2013, “Kebijakan Reformulasi Ancaman Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal MMH*, Jilid 42, No. 1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Arsil, Fitra, 2018, “Menggagas Pembatasan Pembentukan dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan dan Penggunaan Perppu di Negara-Negara Presidensial”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 48. No. 1, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Cuervo-Cazurra, Alvaro, 2006, “Who Cares About Corruption?”, *Journal of International Business Studies*, Vol. 37, No. 6, JSTOR.

Elly Karmeli dan Sitti Fatimah, 2008, “Krisis Ekonomi Indonesia”, *Journal of Indonesian Applied Economics*, Vol. 2, No. 2.

Hanafi Amrani dan Ayu Widya Wati, 2017, “Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Relevansinya dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia”, *Laporan Penelitian Kolaborasi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Hera Warnanie, Isma, 2019 “Efektifitas Eksekusi Pidana Tambahan Dengan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Kasus Korupsi”, *Jurnal Hukum Responsif*, FH UNPAD.

Hiariej, Eddy O.S, 2019, “United Nation Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 1, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

- Humphreys, Stephen, 2006, "Legalizing Lawlessness: On Giorgio Agambes's State of Exception", *The European Journal of International Law*, Vo. 17. No. 3, EJIL.
- Ibrahim M. Shaluf Fakharu'l Ahmadun dan Aini Mat Said, 2003, "A Review of Disaster and Crisis, *Disaster Prevention and Management*, Vo. 12, No. 1, Emerald Insight.
- Iswahyudi, Sudhono, 2011, "Ambiguitas dan Tafsir Ideal Dalam Penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Ringkasan Disertasi*, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro.
- J. Vernon Henderson dan Ari Kuncoro, 2004, "Corruption In Indonesia", *National Bureau Of Economic Research*, Cambridge.
- Jihad, Rijalul, 2019, "Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu (Analisis Terhadap Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh.
- Jong-sung You dan Sanjeev Khagram, 2005, "A Comparative Study of Inequality and Corruption", *American Sociological Review*, Vol. 70, Harvard University.
- Jorji A Nwogu dan Victor Ushahemba Ijirshar, 2016, "The Impact of Corruption on Economic Growth and Cultural Values in Nigeria: A Need for Value Re-Orientation", *International Journal of Economic Management Sciences*, Vol. 6 Int. J Econ Manag.
- Junaid Aman, Muhammad Babar Akram, Muhammad Saud, 2018. "Socio-Political Unrest in Pakistan: A Perception of University Students in the Province of Balochistan Pakistan", *Matra Pembaruan*, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri.
- Keidel, Albert, 2005, "The Economic Basic for Social Unrest in China", *The Third European-American Dialogue on China*, The George Washington University.

- Kourosch Eshghi dan Richard C. Larson, 2008, "Disasters: Lessons from the Past 105 Years, *Disaster Prevention and Management*, Vol. 17, No. 1, Emerald Insight.
- Latif, Abdul, 2016, "Tafsiran Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan MK Atas Pengujian UU PTPK", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 3.
- Lepi T. Tarmidi, 1999, "Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia,.
- Marisa, Kiki, 2017, "Ancaman Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Tesis*, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang.
- Mauro, Paolo, 1998, "Corruption And The Composition of Government Expenditure", *Journal of Public Economics*, Elsevier.
- Mega Zahira Virtyani, Sri Muljaningsih dan Kiki Asmara, 2021, "Studi Peristiwa Penetapan Covid-19 Sebagai Pandemi oleh World Health Organization Terhadap Saham Sektor Healthcare di Bursa Efek Indonesia", *Jurnal Sekuritas*, Vo. 4, No. 3.
- Mohamed Shahuf, Ibrahim, 2007, "On Overview Disasters", *Disaster Prevention and Management: An International Journal*, Vol. 16, No. 5, Emerald.
- Mufida, Anisa, 2020, "Polemik Pemberian Hukuman Mati Pelaku Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19", *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan*, Vol. 4, No. 1, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Odi, Nwankwo, 2014, "Impact of Corruption on Economic Growth in Nigeria", *Mediterranean Journal of Sociol Scienses*, MCSER Publishing, Rome-Italy.
- Pratama, Vega, 2021, "Restorative Justice in Criminal Acts of Corruption", *Law and Justice*, Vol. 6, No. 1, Universitas Airlangga.
- Putra Agina Widyaswara Suwaryo dan Podo Yuwono, 2017, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengetahuan Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Alam Tanah

Longsor”, *Proceeding*, Universitas Muhammadiyah Malang.

Rahardjo dan M. Haryanto, 2007, “Penanganan Tindak Pidana Korupsi dan Hambatannya, *Jurnal Refleksi Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana.

Rangkuti, Irvino, 2019, “Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Tesis*, Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Regina Schroter, Alksandar Jovanovic, Ortwin Renn, 2014, “Social Unrest: A Systemic Risk Perspective”, *Global Risk Forum Davos*, Vol. 2, No. 2, Planet Risk.

Richardson, Bill, 1994, “Socio-technical Disasters: Profile and Prevalence”, *Disaster Prevention and Management*, Vol. 3, No. 4, Emerald Insight.

Salamah, Lilik, 2001, “Lingkaran Krisis Ekonomi Indonesia”, *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Th XIV, No. 2.

Sheeran, Scott P, 2013, “Reconceptualizing States of Emergency under International Human Rights Law: Theory, Legal Doctrine and Politics”, *Michigan Journal of International Law*, Vol, 34, Issue 3, University of Essex.

Tarigan, Salomo, 2015, “Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang.

World Health Organisation, 2020, “Mental Health And Psychosocial Considerations During The Covid-19 Outbreak”, *World Health Organisation*.

Yang, Dean, 2011, “Re-view Works: Economic Gangsters: Corruption, Violence and the Poverty of Nations by Raymond Fisman and Edward Miguel”, *Journal of Economic Literature*, Vol. 49, No. 3, JSTOR.

#### **D. Internet**

CNN Indonesia, 2020, “Kronologi Kasus Edhy Prabowo: Awalnya SK, Berakhir di KPK”,

*<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201126012548-12-574574/kronologi-kasus-edhy-prabowo-awalnya-sk-berakhir-di-kpk>.*

CNN Indonesia, 2020, “Kronologi Mensos Juliari Jadi Tersangka Kasus Bansos Corona”,  
*<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201206015241-12-578488/kronologi-mensos-juliari-jadi-tersangka-kasus-bansos-corona>.*

Detiknews, 2012, “Lima Kasus Konflik Sosial Terburuk Pasal 1998”,  
*<https://news.detik.com/berita/d-2125635/lima-kasus-konflik-sosial-terburuk-pasca-1998>.*

Diskusi Publik RUU KUHP di Semarang 4 Maret 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM,  
*<https://www.youtube.com/watch?v=hZYIb42jQek&t=4621s>.*

Guritno, Tatang, 2021, “Data ICW 2020: Kerugian Negara Rp. 56,7 Triliun, Uang Pengganti dari Koruptor Rp. 8,9 Triliun”,  
*<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/19301891/dاتا-icw-2020-kerugian-negara-rp-567-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-rp>.*

Kanal Pengetahuan FH UGM, 2021, “Seminar Nasional Telaah Kritis Terhadap Arah Pembentukan dan Penegakan Hukum di Masa Pandemi”,  
*<https://www.youtube.com/watch?v=AhzWO4jXuaI&t=1737s>.*

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, *<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>*.”

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021, “Statistik TPK Berdasarkan Instansi” *<https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-instansi>.*

Kompas TV, 2020, “Kronologi Edhy Prabowo Terjerat Kasus Suap Ekspor Benih Lobster Hingga Ditetapkan Tersangka”,  
*<https://www.kompas.tv/article/126394/kronologi-edhy-prabowo-terjerat-kasus-suap-ekspor-benih-lobster-hingga-ditetapkan-tersangka?page=all>.*

Kompas TV, 2020, “Mensos Juliari Tak Dijerat Pasal Hukuman Mati, Ini Penilaian Mahfud MD”,  
*<https://www.youtube.com/watch?v=ehah6r0ncXU&t=398s>.*

Kompas TV, 2021, "Pro Kontra Pernyataan Wamenkumham Soal Edhy Prabowo dan Juliari Batubara Layak Dihukum Mati", <https://www.youtube.com/watch?v=pGR5yynZwcE&t=7s>.

Kompas.com, 2020, "KPK Akan Dalam Kerugian Negara Dalam Kasus Suap Bansos Covid-19", <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/14/16560001/kp-k-akan-dalami-kerugian-negara-dalam-kasus-suap-bansos-covid-19?page=all>.

Mutia Annur, Cindy, 2021, "ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai Rp. 28,8 Triliun pada Semester 1 2021", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp-268-triliun-pada-semwawa-1-2021>.

Ramadhan, Ardito, 2021, "Indeks Presepsi Korupsi Indonesia Pada 2020 Turun Jadi 37, Peringkat 102 di Dunia", <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/28/14120521/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2020-turun-jadi-37-peringkat-102-di>.

Rinaldo, 2019, "Kerusuhan Sampit, Kegagalan Merawat Perbedaan 18 Tahun Silam", <https://www.liputan6.com/news/read/3897282/kerusuhan-sampit-kegagalan-merawat-perbedaan-18-tahun-silam>.

Syarifah, Nur, 2015, "Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi", <https://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara-korupsi/>.

TV One, 2020, "Korupsi Bansos Corona, Mensos Terancam Hukum Mati? Pukat UGM: Terlalu Jauh", <https://www.youtube.com/watch?v=pHZvEBMkhe8>.